

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS REALISASI ANGGARAN PUBLIK BERDASARKAN PRINSIP ISLAM DALAM MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI

(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar)

Nursinta bakhtiar¹, Memen Suwandi², Nur Rahma Sari³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹nursintabakhtiar06@gmail.com, ²memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id, ³nur.rahmasahsari@uin-alauddin.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 03-05-2023

Disetujui 04-05-2023

Diterbitkan 05-05-2023

Kata kunci:

transparansi, akuntabilitas, realisasi anggaran, prinsip islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui penggunaan Realisasi Anggaran Publik didinas pekerjaan umum kabupaten takalar, untuk mengetahui sistem transparansi dan akuntabilitas penggunaan realisasi anggaran publik dan untuk mengetahui penerapan prinsip islam yaitu *shiddiq, amanah, tabliq dan fathonah* pada dinas pekerjaan umum kabupaten takalar. Metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pendekatan deskriptif analitis dan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dengan menggunakan triangulasi sumber data menguji keabsahan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan anggaran publik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah disusun sesuai dengan sistem dan prosedur. Adanya transparansi dan akuntabilitas memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan memperhatikan hak masyarakat untuk pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab pengelolaan anggaran. Salah satu manfaat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah mencegah praktik korupsi. Berdasarkan prinsip islam dengan menerapkan sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu: *shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah* dalam kepemimpinan untuk menegakkan moralitas, Jaga kepercayaan, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya, kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Maka tingkat kepercayaanya lebih besar.

ABSTRACT

This study aims to determine the use of Public Budget Realization in the Takalar district public works office, to determine the transparency and accountability system for the use of public budget realization and to determine the application of Islamic principles namely shiddiq, amanah, tabliq and fathonah in the Takalar district public works office. The method according to this research is a qualitative research method.

In this study used a type of qualitative research based on an analytical descriptive approach and the data used by researchers in this study were primary and secondary data. By using data source triangulation to test the validity of the data obtained.

The results of this study indicate that the process of managing public budgets at the planning, implementation and accountability stages has been prepared according to systems and procedures. Transparency and accountability provide information openly and honestly to the public, taking into account the public's right to a comprehensive understanding of budget management responsibilities. One of the benefits of applying the principles of transparency and accountability is preventing corrupt practices. Based on Islamic principles by applying the characteristics of the Prophet and Messenger, namely: shidiq, amanah, tabligh, and fathonah in leadership to uphold morality, maintain trust, be firm in your convictions, honest in carrying out the duties and responsibilities assigned to them, strong in faith in rejecting temptations and opportunities to stray. So the level of trust is greater.

PENDAHULUAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam lingkup pelaksanaannya pemerintah daerah yang bisa diukur dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaannya terkait dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam proses penganggaran merupakan sebuah proses penting yang sering kali menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi terutama pemerintah. Anggaran dapat menggambarkan bagaimana sumber daya yang

diharapkan akan diperoleh dan dipake selama periode waktu tertentu. Pembutan anggaran dalam organisasi sektor publik didalam pemerintah merupak sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politik yang cukup singnifikan. Bagi pemerintah anggaran tidak hanya sebuah tahunan, tetapi merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat lokal secara merata, menyeluruh dan berkelanjutan (Febriyana, 2021). Keberhasilan kinerja instansi pemerintah dapat tercermin dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah apakah kegiatan APBD dijalankan dengan baik. APBD pada dasarnya terdiri dari rencana keuangan daerah untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dalam suatu periode anggaran (F. Anggraeni & Saleh, 2020).

Tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Tata pemerintahan yang baik diwujudkan dalam akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dijalankannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas terlihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Ahmadani Azhari, 2021). Akuntabilitas dapat menyampaikan kewajiban terhadap pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki atau berhak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adanya akuntabilitas berarti memberikan ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Akuntabilitas itu sendiri menjamin efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam organisasi, termasuk organisasi sektor publik, sebagai alat pengukur kinerja sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Adapun transparansi berarti mempertanggung jawabkan apa-apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi relevan, dan memberikan laporan pada pihak luar atau organisasi mandiri seperti legislator, auditor, publik secara terbuka, dan kemudian di publikasikan (Budi S Purnomo, 2018).

Dalam realisasi anggaran diharapkan dapat mewujudkan laporan realisasi anggaran secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Data pencapaian anggaran penuh untuk masing-masing daerah menunjukkan bahwa: Anggaran daerah tidak tepat sasaran, yang tentunya menghambat respons regional. Tanda-tanda faktor penyebab APBD tidak sepenuhnya tepat sasaran, salah satunya bisa dibilang kurangnya pemahaman pemerintah daerah ini mengakomodasi kebijakan pemfokusan ulang dan redistribusi baru. Ini berisi peraturan yang ambigu, dalam arti bahwa pemerintah daerah tidak memiliki pelajari tentang peraturan. Kurangnya pemahaman tentang peraturan sebagai titik potensial kerentanan korupsi seperti dijelaskan di atas. Agaknya, pemerintah sebagai kejujuran dan akuntabilitas hukum di sektor publik. Akuntabilitas terkait kebijakan realokasi APBD di masa pandemi harus didukung oleh Kinerja APIP dan KPK secara sinergis menghilangkan potensi kerawanan Kelola korupsi melalui data audit faktual (Kusworo *et al.*, 2021). *Fleksibilitas* ini membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah penipuan. *Fraud* adalah jenis kecurangan yang melanggar aturan hukum dan banyak ditemukan di sektor publik yaitu instansi pemerintah (Firmansyah *et al.*, 2021).

Penyusunan anggaran di publik merupakan suatu proses yang cukup rumit, selisih besaran antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan ini menjadi perhatian utama. Besaran angka tersebut secara tidak langsung mengungkapkan kapasitas SKPD dalam penyusunan anggaran (Endiana, 2019). Fenomena akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak terjadi penyimpangan atau *backlog* dalam penggunaan anggaran instansi pemerintah. Pengguna anggaran adalah istilah yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan mengacu pada pejabat yang memiliki hak untuk menggunakan anggaran di berbagai kementerian, lembaga, beberapa unit kerja daerah, atau pejabat yang setara dengan lembaga pengguna anggaran. TAKALAR, UJUNGJARI–Tim penyidik Kejaksaan Tinggi SulSel berjanji akan menuntaskan salah satu kasus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan umum (PU) kabupaten Takalar. Kasus tersebut yakni kasus dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan senilai 1,5 M tahun anggaran 2018 – 2019. Pada kondisi pandemi *Covid-19* ini jelas mempengaruhi kerja-kerja kami khususnya menghadirkan saksi. Tetapi jelasnya kami terus bekerja dan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan dokumen terkait kasus dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan telah masuk tahap penyelidikan kata Andi Faik. Kejati Sulsel berkomitmen akan

menuntaskan laporan kasus dugaan korupsi dengan memeriksa saksi-saksi guna memberikan keterangannya dan pengumpulan dokumen.

Satu kesuksesan dalam kehidupan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh sikap dan karakter yang dimiliki. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Namun, ini seseorang dapat memiliki sikap dan karakter yang baik dalam islam dikaitkan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad, AS. Dia memiliki sifat-sifat mulia yaitu *Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh*. Karakter *Shidiq* yaitu karakter yang jujur disiplin. Karakter *Amanah* yaitu pekerja keras dan bertanggung jawab. Karakter *Fathonah* termasuk kepribadian yang ingin tahu dan kreatif. Karakter *Tabligh* yaitu peduli sosial dan komunikatif (Musyirifin, 2020). Sifat-sifat inilah yang diidentikkan melekat pada diri seseorang dalam proses menjalankan kepemimpinan diharapkan memiliki sifat karakteristik yang dijiwai oleh nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah Saw. Melalui sifat mulia Rasulullah Saw yang terdapat dalam sifat wajib Rasul artinya dalam setiap tindakan dalam rangka kepemimpinan yang dijalankan seharusnya mengedepankan prinsip islam yaitu *Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah*. Maka korupsi dan sejenisnya tidak akan berani dilakukan. Sebagai perbuatan yang dapat merugikan banyak orang, praktik korupsi seringkali dilandasi oleh ketidakjujuran dan tidak *Amanah*. Mereka lebih memilih memperkaya diri dengan mengambil uang yang bukan haknya. Mereka begitu rakus dan ingin disihir oleh kekayaan, sehingga mereka salah jalan. Jadi, jika ada di antara kita yang masih diberikan kekuasaan, mulai sekarang kita harus menanamkan dalam diri kita untuk meneladani sifat-sifat kenabian tersebut di atas seoptimal mungkin, sehingga kita bukan hanya saja menjauhkan diri terhadap perbuatan korupsi, melainkan bahkan tidak pernah kepikiran untuk melakukan perbuatan tercela tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Teori legitimasi

Dalam penelitian ini, teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh *Dowling dan Pfeffer* (1975) dalam *Bustanul et al* (2012). Teori legitimasi telah digunakan dalam penelitian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Achmad Badjuri, Jaeni, 2021). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus terus berusaha untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat (Yoehana, 2013). Menurut Nor Hadi (2011), legitimasi adalah keadaan psikologis yang berpihak pada orang dan kelompok, baik fisik maupun non fisik, yang sangat peka terhadap gejala-gejala di sekitarnya. Menurutnya, mengutip O'Donovan (2002), legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai apa yang diberikan masyarakat kepada perusahaan, dan apa yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan potensi keuntungan atau sumber daya bagi kelangsungan hidup perusahaan (Badu, 2019).

Prinsip islam

Prinsip dapat dianggap sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Juga berkontribusi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip, terutama prinsip-prinsip Islam. Asas-asas Islam yang dimaksud di sini adalah asas-asas yang dapat dijadikan acuan dan asas-asas tersebut tetap mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Ketika akuntansi dari sudut pandang Islam, itu semua tentang norma-norma positif dan membawa nilai-nilai Allah dalam kehidupan sehari-hari, mencari kehendak Allah dan mengikuti perintah-Nya dalam bentuk hadits Nabi Muhammad SAW. Tujuan akuntansi dan manajemen Islam tidak hanya berorientasi pada dunia dan uang, tetapi juga mencari imbalan batin jangka panjang, berkah Allah. Dalam sebuah inti dari kepemimpinan profetik adalah seorang pemimpin harus mencerminkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, yaitu: *shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah*. Menjelaskan sosok pemimpin tauladan harus memenuhi 4 pilar suri tauladan para Nabi dan Rosul, yakni:

1. *Shidiq* (Jujur)

Siddiq artinya kebenaran (kejujuran). Tidak hanya kata-katanya yang benar, tetapi tindakannya juga benar (sejalan dengan kata-katanya). Pedagang harus jujur dalam menjalankan bisnis jual belinya. Kejujuran dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengarang fakta, tidak mengkhianati, tidak merusak kepercayaan, dll. *Shidiq* (kejujuran) dapat diartikan sebagai keterpaduan/keselarasan antara apa yang dikatakan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan (Eva Trisnawati, Abdul Wahab, 2021). Kejujuran juga memiliki arti menyesuaikan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Menurut Imam Ghazali, kata sidik

jari mengandung enam arti, yaitu ucapan yang benar, niat dan keinginan, angan-angan, menepati janji, perbuatan baik dan ketaatan pada agama (Al-Ghazali, Vol. 4:375). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”. (QS. Al-Taubah (9): 119).

2. *Amanah*

Amanah dalam konteks yang dibahas disini adalah seorang tenaga penjual yang mampu menjaga sikap amanah, artinya dia benar-benar dapat dipercaya untuk menegakkan segala hak kliennya, baik materil maupun immateriil. Sebagaimana dikatakan Yusuf Al-Qardhawi, hasil amanah adalah kembalinya segala hak kepada pemiliknya, baik sedikit maupun banyak, tidak lebih dari apa yang dimilikinya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa penjualan, biaya, jasa atau upah tenaga kerja (Al-Qardhawi, 2001:298).

Seperti firman Tuhan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS al-Nisa(4): 58).

3. *Tabligh* (Menyampaikan)

Kata *tabligh* dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya mengantarkan. Dia selalu serius ketika berbicara, tetapi meskipun demikian dia tidak lupa untuk terlibat dalam humor dan lelucon, tetapi dia selalu mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia marah, dia tidak pernah menunjukkan kemarahannya. Cerdas, murah hati, dan mudah bergaul (Nasuka, 2012). Memiliki tujuan yang jelas, berkemauan keras, bertekad, dan tidak pernah meragukan tujuan Anda (Haikal, 2006:69). Sebenarnya, apa yang dilakukan para nabi menurut standar umum adalah hal yang wajar. Kita tentu tidak suka diganggu oleh orang lain saat kita sedang berada di depan umum atau sedang berbicara dengan seseorang. Tetapi menurut standar para nabi, ini tidak cukup. Inilah sebabnya mengapa Allah menegurnya. Sebagai tabu, meskipun ayat ini bersifat sarkastik, Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikannya kepada kita. Inilah hakikat seorang nabi (Muhammad Nurfaizy Hamdan, Fatahillah Ruslan, Riswanda Fatriansah Husain, Suhartono, 2020).

4. *Fathonah* (cerdas)

Fathonah artinya memiliki pengetahuan yang luas atau cerdas. Intelijen bukan itu yang dia maksud hanya kecerdasan, tapi juga kecerdasan emosional dan kebijaksanaan rohani. *Fathonah* juga merupakan kemampuan untuk memberi makna ibadah untuk setiap aktivitas melalui langkah-langkah dan pemikiran alami, secara keseluruhan dan mentalitas monoteistik dan ada prinsip hanya karena Allah SWT. Semoga bisa belajar tentang sifat-sifat Allah SWT dengan Rasulullah SAW, kami semakin cinta dengan dia. Namun, cintailah nabi Muhammad SAW tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata, tapi juga harus dinyatakan dalam bentuk Tindakan. salah satu dari Bagaimana Mencontoh Akhlak Nabi Muhammad dan ajak yang lain untuk meniru Peran Nabi Muhammad dalam drama Semua kegiatan.

Sifat *fathonah* ini merupakan salah satu akhlak terpuji dalam Islam. Menyebarkan budi pekerti mulia merupakan misi universal Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana sabda beliau: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak," (H.R. Baihaqi).

Anggaran publik

Penelitian Mardiasmo (2009:62) menjelaskan bahwa anggaran publik memuat rencana kegiatan yang dinyatakan dalam rencana perolehan pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter. Dalam

bentuknya yang paling sederhana, anggaran publik adalah dokumen yang menggambarkan situasi keuangan suatu badan atau termasuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan. Anggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan dan dinyatakan dalam satuan moneter. Di sektor publik, anggaran harus dikeluarkan ke publik untuk kritik, diskusi, dan masukan. Anggaran sektor publik merupakan alat akuntabilitas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan kegiatan yang didanai publik (Muchriana muchran, Endang winarsih, 2021). Dalam organisasi sektor publik, penganggaran adalah proses politik. Karena di sektor publik, anggaran harus dikomunikasikan kepada publik untuk kritik, diskusi dan masukan (Waney et al., 2018).

Dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial menyatakan hal-hal berikutnya.

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besar pemasukan tersebut.

Adapun siklus anggaran pada organisasi sektor publik, pembuatan anggaran umumnya melewati lima tahapan.

1. Persiapan (*preparation*)

Pada tahap persiapan, bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Kemudian, setiap unit dipemerintahan mengajukan anggaran yang selanjutnya akan dikonsultasikan oleh bagian anggaran.

2. Persetujuan lembaga legislatif (*legislatif enactment*)

Anggaran dilanjutkan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatif (terutama komite) anggaran akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

3. Administrasi (*administration*)

Setelah anggaran disahkan, pelaksanaan anggaran dimulai, baik pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan .

4. Pelaporan (*reporting*)

Pelaporan dilakukan pada aktif periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.

5. Pemeriksaan (*pot-audit*)

Kemudian, laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (*feedback*) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan proses perencanaan, persiapan pelaksanaan dan laporan evaluasi anggaran. Transparansi anggaran sangat mempengaruhi realisasinya terutama pada bagian keuangan dinas pekerjaan umum kota takalar, Dinas pekerjaan umum dapat dikatakan sebagai instansi yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sarana dan prasarana umum untuk penggunaan umum Disediakan oleh departemen pekerjaan umum (Saridewi *et al.*, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, transparansi adalah penyediaan laporan keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, dengan memperhatikan hak publik untuk memiliki pemahaman yang terbuka dan menyeluruh tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan sumber dayanya. Kepatuhan terhadap hukum Informasi dan peraturan. Salah satu prinsip keterbukaan harus dipenuhi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Asas keterbukaan yang terlibat, yaitu hak untuk membuka akses informasi ketatanegaraan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada publik, dengan tetap memperhatikan asas perlindungan hak-hak individu, kelompok, dan rahasia negara (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999) (Khairudin, 2016).

Menurut (Rusrina, 2020) penelitiannya menyebutkan bahwa indikator transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan
- b. Adanya akses informasi dan keterbukaan yang jelas mengenai pertanggungjawaban
- c. Adanya akses informasi pengelolaan keuangan pemerintah perlu didorong untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dengan cara yang akurat, relevan, dan tepat waktu (Nurhadio & Khamisah, 2019).

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas akuntabilitas publik, artinya proses penganggaran dapat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan badan perwakilannya. Akuntabilitas dinas pekerjaan umum yang baik, dengan pelaporan yang detail pada setiap kegiatan, apalagi sekarang dengan sistem lelang, data keuangan harus tersedia untuk setiap kegiatan dan juga dilaporkan oleh mitra lelang. Dalam studi tersebut, Khairuddin 2016 menyatakan bahwa akuntabilitas bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor untuk mencapai target yang ditetapkan secara teratur (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial termasuk kedalam kategori sangat baik. Sedangkan akuntabilitas termasuk kedalam kategori baik mirip yang sudah dibahas di pembahasan sebelumnya bahwa masih adanya ketidak sesuaian antara perencanaan serta pelaksanaannya baik berasal segi aktivitas juga hasilnya bisa berdampak di akuntabilitas suatu instansi (F. Anggraeni & Saleh, 2020).

Adapun peneliti (Putri Asih, Widaryanti, 2021) seperti yang telah dikemukakan oleh *Elwood* bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik antara lain:

- a. Kejujuran dan Tanggung Jawab Hukum, Tanggung Jawab Kejujuran berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan Tanggung Jawab Hukum berkaitan dengan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain saat menggunakan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses, yang berkaitan dengan kecukupan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program, yang melibatkan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai, dan apakah program alternatif yang memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah dipertimbangkan.
- d. Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Kebijakan berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Korupsi

Pada 2008-2009, korupsi bukan lagi rahasia umum. Banyak stasiun TV yang secara terbuka memberitakan dan menyiarkan penangkapan oknum-oknum koruptor oleh KPK. Korupsi sendiri kini dianggap sebagai akar penyebab masalah negara, seperti biaya ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah dan hambatan investasi. Korupsi terjadi karena lemahnya tata kelola perusahaan oleh perusahaan dan pemerintah. Secara teori, dampak dari lemahnya corporate governance pada suatu perusahaan dapat menyebabkan turunnya harga saham di pasar modal. Perubahan lingkungan bisnis dan pemerintahan telah membawa terlalu banyak insentif dan motivasi untuk korupsi, dan masalah dan solusi tentang korupsi biasanya dilihat dari perspektif ekonomi, sosiologi, budaya, sistem pemerintahan dan hukum (T. D. Anggraeni, 2014). Korupsi bukan budaya nasional, bukan kebiasaan, dan bukan salah urus yang selalu diperhatikan. Korupsi adalah kejahatan, dan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum tertentu dan merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, negara bahkan bangsa. Pada dasarnya, penyalahgunaan kekuasaan publik merugikan negara atau masyarakat dan ilegal. Di beberapa negara, ketentuan korupsi juga berlaku bagi individu atau kelompok (Syarief & Prastiyo, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kac. Pattalassang Kab. Takalar. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu data primer di peroleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil berasal dokumen, foto, data dan penelitian terdahulu yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan adalah

studi lapangan melalui dari wawancara kepada informan secara langsung, kemudian melakukan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis keadaan proses pelaksanaan anggaran dan menganalisis desentralisasi tanggung jawab, wewenang, dan tanggung jawab oleh entitas. Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengelolaan anggaran publik pada dinas pekerjaan umum kabupaten takalar

Menurut Jones dan Pendlebury (2010) Tahapan yang ditempuh dalam proses penyusunan anggaran meliputi: (a) Penyusunan perkiraan untuk setiap komponen organisasi; (b) Konsolidasi perkiraan untuk setiap komponen; (c) Pengajuan rancangan anggaran kepada badan tertinggi organisasi untuk dibahas dan disetujui.

Anggaran suatu negara adalah proses kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dan karena itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Anggaran publik berperan penting sebagai alat legitimasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Direktorat Jenderal Anggaran, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diutarakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar, 11 Agustus 2022 sebagai berikut;

“Proses pelaksanaan realisasi anggaran pada pemerintah daerah diatur oleh peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dimana didalamnya mengatur tata cara pengelolaan anggaran”. (hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Bapak Muhsin, S.Sos)

Dari hasil wawancara dari kepala dinas dimana pelaksanaan realisasi anggaran publik diatur oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dimana didalamnya mengatur tata cara pengelolaan anggaran didinas pekerjaan umum kabupaten takalar.

Adapun pengelolaan Anggaran pada Dinas pekerjaan umum kabupaten takalar secara ringkas yaitu;

1. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) telah disahkan
2. Menyusun Permintaan SPD (Surat Penyediaan Dana) kemudian di usul ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) untuk diterbitkan SPD
3. Mengusulkan Permintaan UP (uang persediaan) untuk Bendahara Pengeluaran
4. Bendahara Pengeluaran mengusulkan permintaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Untuk UP, TU dan GU)
5. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mengusulkan SPP untuk Pembayaran LS (Langsung)
6. PPK SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD) melakukan verifikasi Dokumen Pembayaran SPP
7. PPK SKPD menerbitkan SPM UP, GU, TU dan LS kemudian di ajukan ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah
8. BPKAD selaku BUD melakukan verifikasi dan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
9. Selanjutnya untuk transaksi UP, GU dan TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan membayar sesuai Tagihan dengan Kuitansi dan dokumen kelengkapannya.
10. Bendahara Pengeluaran mencatat transaksi melalui pembukuan bendahara.
11. Menyusun Laporan Keuangan Setiap Bulannya.

Transparansi dan akuntabilitas realisasi anggaran publik pada dinas pekerjaan umum kabupaten takalar

Dalam prinsip transparansi dari hasil wawancara mengatakan kepercayaan pemerintah yang bersifat terbuka dan mengajak publik untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan realisasi anggaran publik. Transparansi pengelolaan keuangan adalah salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah buat mencegah tindak pidana korupsi dan pada rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Government) (Nurhadianto & Khamisah, 2019).

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah maka perlu dilibatkan setiap tahapan pengalokasian anggaran publik. dimulai dari kegiatan dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Rencana anggaran dalam suatu organisasi harus disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan organisasi, dinyatakan dalam satuan keuangan (currency unit), dan berlaku untuk periode waktu yang akan datang. Tahap anggaran sangat penting karena anggaran harus berorientasi pada kinerja organisasi agar rencana yang telah disusun dapat terwujud. Anggaran adalah rencana tindakan manajemen yang memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Merencanakan anggaran dalam suatu organisasi adalah pekerjaan yang paling memakan waktu. Banyak orang menganggap anggaran sebagai format keuangan sederhana yang dilampirkan pada proposal proyek. Namun, ketika menganalisis proyek yang sedang berjalan, Anda menyadari bahwa anggaran adalah bagian penting dari sebuah proyek. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut; “Dalam proses perencanaan ini, pertama kita susun yang namanya katalog itu yang disusun berapa harga per item bahan material maupun upa kerja dan sebagainya kemudian dari katalog ini lah kita tunjukkan perencanaan untuk menyusun seberapa besar biaya yang dibutuhkan sehingga kita harapkan publik tau tentang itu” (Hasil wawancara Sekretaris Dinas PU, Bapak Amrant S, Sos, pada tanggal 2 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan sekretaris dinas pekerjaan umum proses perencanaan anggaran publik dilakukan melalui susunan katalog yang dimaksud adalah pusat dokumentasi atau beberapa pusat dokumentasi yang disusun menurut sistem tertentu.

Perencanaan anggaran adalah tahap awal dan terpenting dari siklus anggaran pemerintah, termasuk perencanaan, persetujuan, pelaksanaan dan pemantauan. Perencanaan bahkan menjadi kajian yang menarik dalam bidang administrasi publik. Dengan terjadinya kecurangan anggaran pada tahap ini terjadi ketika ada kolusi antara pihak eksekutif dengan pihak swasta, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Perencanaan berarti pasti kegiatan yang mungkin/dapat dilakukan sebelumnya dan caranya melakukannya karena suatu aktivitas berhasil mencapai tujuan yang diinginkan Efisiensi dan efektivitas ditentukan oleh perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang baik tepat, dan dikelola dengan baik (Yuhertiana et al., 2015). Hal ini sesuai dengan pernyataan bendahara Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut.

“Tahapan Perencanaan realisasi anggaran didinas PU yaitu Persiapan, Ratifikasi, Implementasi, Evaluasi, pelaporan, kesediaan anggaran, meminimalisasi anggaran dan menyempurnakan anggaran yang telah disusun”. (Hasil wawancara bendahara Dinas PU, ibu Asmah, S.Sos, pada tanggal 4 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bahwa perencanaan realisasi anggaran didinas pekerjaan umum melalui persiapan Ratifikasi, Implementasi, Evaluasi, pelaporan, kesediaan anggaran dan menyusun anggaran yang telah disusun dengan baik. Pentingnya perencanaan penganggaran dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. hanya konsistensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana mencapai suatu kondisi pemerintahan Tata Kelola dan Politik Pemerintah dalam perencanaan anggaran.

b. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran adalah proses bagaimana melaksanakan atau mencapai apa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan Anggaran. Dalam praktiknya, belanja harus dilakukan sesuai dengan detail objek belanja yang ditentukan. Untuk pergerakan anggaran dari satu kegiatan ke program lain harus disetujui oleh DPRD. Pelaksanaan tersebut juga telah dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan sudah sesuai dengan sistem dan prosedur karena pelaksanaan anggaran sudah diatur dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang, Peraturan Presiden, peraturan Menteri, DPRD, Peraturan Bupati dan aturan lain yang mendasarinya”. (Hasil wawancara dengan kepala Dinas PU, Bapak Muhsim, S.Sos, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Hasil wawancara tersebut sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran publik ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku didinas pekerjaan umm yaitu undang-undang, Peraturan Presiden, peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan aturan lain yang mendasarinya.

Isu-isu umum dalam menentukan pelaksanaan anggaran lingkup daerah meliputi upaya untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi isu-isu yang memerlukan perhatian dan prioritas yang perlu ditangani. Identifikasi masalah bertujuan untuk secara akurat mendefinisikan masalah umum dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Identifikasi dilakukan berdasarkan analisis data untuk menunjukkan permasalahan umum berupa komponen atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang kurang optimal atau kurang lancar. Tanda-tanda masalah terpenting yang muncul dapat dijadikan sebagai masalah umum dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan masalah umum yang diidentifikasi dan faktor serta akar penyebab yang diidentifikasi, alternatif atau solusi dapat dikembangkan. Rekomendasi dapat berupa kebijakan/peraturan atau tindakan yang mempengaruhi atau mempengaruhi pengurangan/penghapusan masalah yang terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris Dinas PU.

“Cara mengatasinya menghadap jika terdapat kesulitan dalam pelaksanaan realisasi anggaran public yaitu dengan melakukan kordinasi dengan perangkat daerah seperti badan pengelola keuangan, Inspektorat Kabupaten, Bagian Hukum dan Lembaga-lembaga lain seperti BPK dan BPKP”(Hasil wawancara sekretaris Dinas PU, tanggal 2 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh sekretaris dinas pekerjaan umum ketika terjadi kesulitan dalam pelaksanaan realisasi anggaran publik dapat melakukan kordinasi dengan perangkat daerah yaitu BPK dan lembaga lainnya.

Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini tidak diperhatikan:

1. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas.
2. Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas.
3. Tidak didukung oleh masyarakat.
4. Dana tidak cukup

Tabel 1.1
Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Takalar , Tahun 31 Desember 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISAS I 2020
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI				
DAERAH				
Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Retribusi Daerah	680.000.000,00	637.398.900,00	93.74	437.572.05 0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00
	680.000.000,00	637.398.900,00	93,74	437.572.05 0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERNTAH				
PUSAT – DANA				
PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISAS I 2020
Dana Alokasi Khusus-Fisik	23.467.821.00,0 0	23.118.924.500,0 0	98,51	0.00
	23.467.821.000, 00	23.118.924.500,0 0	98,51	0.00
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapat Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapat Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	24.147.821.000, 00	23.756.323.400,0 0	98,38	437.572.05 0,00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	7.271.984.250,6 2	6.575.634.644,00	90,42	6.906.714.9 77,00
Belanja Barang dan Jasa	14.758.408.156, 00	13.243.624.001,0 0	89,74	5.932.505.3 29,00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hiban	2.846.417.743.4 40,00	1.281.650.600,00	45,03	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA OPERASI	24.876.810.150, 06	21.100.909.245,0 0	84,82	12.839.220. 306,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	244.625.000,00	97.695.000,00	39,94	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	373.021.450,00	315.601.789,00	84,61	
Belanja Gedung dan Bangunan	16.284.126.050, 00	6.575.745.864,72	40,38	380.499.45 0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.499.032.349 ,12	46.341.988.327,3 8	32,31	5.627.061.9 22,94
Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	7.415.291.1 21,00
Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	160.350.804.849 ,12	53.331.040.981,1 0	33,26	13.522.781. 493,94
JUMLAH BELANJA MODAL	185.227.614.999 ,18	74.431.950.226,1 0	40,18	26.362.001. 799,94
SURPLUS/DEFISIT	(161.079.793.99 9,18)	(50.675.626.826,1 0)	31,46	(25.924.42 9.749,94)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar 2021, Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 21.100.909.245,00 atau 84,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar 24.876.810.150,06 terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar 6.575.634.644,00 atau 90,42% dari anggaran sebesar 7.271.984.250,62.

Realisasi belanja pegawai sebesar 6.575.634.644,00 merupakan realisasi belanja pegawai berstatus PNS pada Dinas Pekerjaan Uumu Kabupaten Takalar. Sedangkan dari sebesar 7.271.984.250,62, belanja barang dan jasa sebesar 13.243.624.001,00 atau 89,74% dari anggaran

sebesar 14.758.408.156,00 dan belanja modal sebesar 74.431.950.226,10 atau 40,18% anggaran sebesar 185.227.614.999,18.

c. Tahapan pertanggungjawaban

Tujuan pertanggungjawaban adalah untuk menyediakan informasi keuangan lengkap dan akurat dalam bentuk dan waktu yang benar, pasangan ini pihak yang bertanggungjawab atas pengoperasian unit pemerintah. Selanjutnya, tujuan dari tanggungjawab ini mengharuskan setiap orang atau badan yang mengelola keuangan negara wajib menyediakan pertanggungjawaban atau perhitungan. Tanggung jawab pelaksanaan APBD dikomunikasikan dalam bentuk pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah, berupa peraturan daerah yang terkait dengan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah serta standar teknis terkait lainnya. Tantangan pemerintahan yang akuntabel kepada publik dan selalu terbuka untuk publik melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Dalam pertanggungjawaban ini setiap tahun kegiatan kita buat dan susunan LKPJ laporan pertanggungjawaban. Kita serahkan ke DPRD setelah itu akan dilihat apakah LKPJ yang kita susun itu sesuai dengan realisasi anggaran atau tidak”.(Hasil Wawancara Sekretaris Dinas PU, Bapak Amrant S,Sos, pada tanggal 2 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas bahwa pertanggungjawaban setiap tahun dibuat dengan susunan LKPJ dan diserahkan ke DPRD dan dilihat apakah sesuai dengan rencana realisasi anggaran atau tidak. Laporan merupakan penyampaian keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan Untuk jangka waktu tertentu terkait dengan hasil kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terkait pelaksanaan tugas,otoritas. Sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah diselesaikan.

Prinsip akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan peraturan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan dihadapan publik secara administratif dan politik dan dilaporkan secara berkala dan dibahas bersama untuk dijadikan dasar pembambilan kebijakan dari pemerintah daerah. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Akuntabilitas penggunaan anggaran pada instansi pemerintah berdasarkan prinsip islam (Studi:satuan kerja perangkat daerah), akuntabilitas sudah banyak diterapkan disektor publik dengan tata kelola yang baik. Namun dalam akuntabilitas Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial. Sebagai salah satu upaya untuk mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah memberikan penghargaan atas akuntabilitas entitas.

Transparansi Dan Akuntabilitas Realisasi Anggaran Publik Berdasarkan Prinsip Islam Dalam Mencegah Praktik Korupsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar.

Pada saat ini dalam pengelolaan keuangan publik , didunia islam kehilangan hal penting diantaranya adalah *shidiq* (jujur), *amanah*, *tabligh* (menyampaikan) dan *fathonah* (cerdas) berikut penjelasannya;

Shidiq adalah karakter Nabi Muhammad SAW yang berarti “kebenaran dan kejujuran”. Sebagai seorang pemimpin, selama kepemimpinannya efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, visi/misi, penetapan tujuan dan sasaran, serta pelaksanaan dan operasi di lapangan, tindakannya selalu benar dan jujur. Sebagai pemimpin perusahaan, ia selalu jujur kepada perusahaan (pemegang saham), pelanggan (*customer*), pesaing (*kompetitor*), dan orang (karyawan itu sendiri), sehingga perusahaan benar-benar dapat berjalan dengan prinsip kejujuran. Dari hasil wawancara kepala Dinas PU yang mengatakan .

“Peran pemerintah daerah dalam menerapkan nilai kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pengelolaan realisasi anggaran publik yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran yang dilakukan oleh tingkat OPD, Kabupaten, dan pengawasan dari tim inspektorat dan DPRD” (Hasil wawancara dengan kepala Dinas PU, Bapak Muhsim, S.Sos, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Nilai kejujuran atau kebenaran juga dapat dilihat dari wawancara kepala dinas pekerjaan umum kabupaten takalar yaitu Peran pemerintah daerah dalam menerapkan nilai kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai pengelolaan realisasi anggaran publik yaitu dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran yang dilakukan oleh tingkat OPD, Kabupaten, dan pengawasan dari tim inspektorat dan DPRD. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa setiap kegiatan dilakukan pengawasan dari inspektorat dan DPRD. Penerapan nilai *Sihdiq* adalah panutan atau contoh yang baik, memberikan kesadaran melalui bersikap jujur

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. *Amanah* juga dapat mengungkapkan keinginan untuk mencapai sesuatu seperti yang ditentukan. Melengkapinya di antara nilai-nilai yang diasosiasikan dengan kejujuran adalah dapat dipercaya. *Amanah* juga merupakan salah satu akhlak iman. Integritas seseorang dapat terbentuk dari sejauh mana seseorang mampu menjaga kepercayaan terhadap dirinya.

Dalam hasil wawancara mengatakan pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap realisasi anggaran yaitu dengan membangun komunikasi publik mengenai realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengerjakan pekerjaan kegiatan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul analisis perencanaan penganggaran keuangan pada dinas pekerjaan umum kabupaten kepahing mengatakan pada perencanaan anggaran publik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor strategis, akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kepemimpinan serta komitmen organisasi seseorang perencana anggaran publik. Akan semakin baik akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal, kepemimpinan serta komitmen organisasi seseorang pegawai perencana anggaran maka kriteria keberhasilan perencanaan anggaran akan praktis.

Tabligh sifatnya berkomunikasi dengan benar (memiliki bobot) dan mengucapkan kata-kata yang tepat. Hakikat *tabligh* terletak pada bahasa bi al-hikma-nya, yaitu berbicara kepada orang lain dalam hal yang mudah dipahami dan diterima akal, bukan pada hal yang sulit dipahami.

Fathonah berarti kebijaksanaan, sebagai lawan dari jahlun (bodoh). Kecerdasan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam kehidupan individu. *Fathonah* diartikan sebagai kebijaksanaan, keterampilan atau penguasaan suatu bidang tertentu. Kecerdasan adalah kemampuan untuk berpikir lebih cepat, memecahkan masalah lebih mudah, dan mengatasi kesulitan lebih akurat daripada yang lain. Menurut Toto Tasmara (2001: 212), *Fathonah* adalah kecerdasan yang meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan terutama kecerdasan spiritual. Pandangan Abdul Malik (2013:197) *Fathonah* pribadi tidak hanya menguasai bidang sains, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Tidak hanya pintar tapi juga kebijaksanaan dan kebijaksanaan berpikir dan bertindak. *Fathonah* menjadi kecerdasan total dimulai dengan Ketajaman intuitif mata batin (*basirah*), yang berada pada tingkat spiritual (DARIMIS, 2015).

Setiap kepemimpinan memiliki kualitas dan karakteristik kualita antara lain, ada komitmen yang kuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara bukan untuk individu atau kelompok, dan memiliki kredibilitas yang memenuhi syarat, seperti: kemampuan untuk menegakkan moralitas, Jaga kepercayaan, setia pada kesepakatan dan janji, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya, kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang (Rohimah, 2021). Dari hasil wawancara mengatakan pemerintah daerah sudah menyampaikan informasi kepada publik berkaitan tentang realisasi anggaran yang direncanakan yaitu informasi mengenai realisasi anggaran pemerintah daerah Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan dibahas di tingkat Kabupaten dan tingkat provinsi, selain itu juga telah melaporkan di Aplikasi dari Kementerian Keuangan yang Namanya aplikasi OMSPAN.

Dengan adanya transparansi memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan memperhatikan hak masyarakat untuk pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab pengelolaan anggaran kepada pemerintah dan mematuhi hukum dan peraturan. Salah satu manfaat penerapan prinsip transparansi adalah mencegah korupsi terjadi, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan yang meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan masyarakat menjadi lebih baik ukur kinerja pemerintah dan tingkatkan kepercayaan pada komitmen pemerintah memutuskan kebijakan tertentu. Akhirnya transparansi dapat menjadi alat penting untuk menghemat uang orang dari korupsi.

“Ya, dalam proses pengadaan baik dari kegiatan fisik maupun non fisik kita melakukan tender secara terbuka melalui LPSE jadi tender itu tidak lagi secara manual tetapi secara online sehingga

semua masyarakat yang ada di Indonesia bukan saja di kabupaten takalar berhak mengikut serta mengikuti tender tersebut” (Hasil wawancara sekretaris Dinas PU, tanggal 2 Agustus 2022).

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh kepala dinas pekerjaan umum kabupaten takalar, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Salah satu solusi yang dilakukan bahwa proses pengadaan baik pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparansi dan itu sudah dilakukan yaitu semua proses pengadaan baik pengadaan barang maupun pengadaan jasa harus melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Disamping itu ada juga pengawasan dari aparat terkait”. (Hasil wawancara dengan kepala Dinas PU, Bapak Muhsim, S.Sos, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil informasi terkait upaya pencegahan korupsi baik pengadaan barang maupun pengadaan jasa dengan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) jadi tender itu tidak lagi secara manual tetapi secara online sehingga semua masyarakat yang ada di Indonesia bukan saja di kabupaten takalar berhak mengikut serta mengikuti tender tersebut.

Korupsi merupakan kejahatan besar di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Kasus korupsi ada di berbagai bidang. Korupsi juga terjadi di semua sektor dan kekuasaan, termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif dan swasta. Data Transparency International menunjukkan tingkat indeks persepsi korupsi di negara-negara di dunia. Reformasi sistem birokrasi pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui kombinasi reformasi tatanan-reformasi prosedur, reformasi kinerja-reformasi program, dan strategi yang ditempuh adalah struktural dan perilaku.

Tanggung jawab proses terkait dengan apakah prosedur digunakan atau tidak apakah tugas dilakukan dengan cukup baik, kecukupan sistem informasi akuntansi, informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas perencanaan berkaitan erat dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai diimplementasikan atau tidak, dan apakah alternatif program lain dipertimbangkan memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah. Kebijakan terkait akuntabilitas pemerintah, termasuk pusat dan daerah, Kebijakan DPR/DPRD dan masyarakat besar (Himawan Pradipta, Achmad, 2022).

Di tengah kondisi ini, berbagai kebijakan publik masih saja teridentifikasi sarat akan praktik korupsi, bahkan cenderung menguntungkan segelintir pihak saja. Pemerintah memang telah melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap praktik korupsi, layaknya pendirian lembaga negara bantu; KPK, pendirian pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor, adanya reformasi pengelolaan keuangan, penguatan lembaga-lembaga keuangan. Memang terdapat beragam faktor yang menyebabkan masih maraknya wabah korupsi dalam praktik penyelenggaraan negara, antara lain minimnya kesadaran dari para penyelenggara negara untuk melawan korupsi, sebagaimana telah ditunjukkan dalam data dari KPK sebelum ini (Zakaria & Setyoko, 2011). Dari hasil wawancara di dinas pekerjaan umum kabupaten takalar dalam mencegah praktik korupsi.

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencegah fraud yaitu: Pertama meningkatkan pengawasan lebih ketat oleh tim Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kedua memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera agar tidak korupsi tidak terulangi kembali pada masa yang akan datang apalagi sudah ada aturan bahwa aparat yang terlibat korupsi akan dipecat. Ketiga meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memberikan tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya” ”. (Hasil wawancara dengan kepala Dinas PU, Bapak Muhsim, S.Sos, pada tanggal 11 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa pemerintah daerah di dinas pekerjaan umum kabupaten takalar dalam mencegah fraud pengawasan harus lebih ditingkatkan oleh tim Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah dan diberi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku dapat menimbulkan efek jera agar tidak melakukan tindakan korupsi lagi. Dengan adanya upaya pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi ini dengan menerapkan prinsip islam yaitu siddiq, amanah dan tabliq akan membantuh mencegah terjadinya praktik korupsi di dinas pekerjaan umum kabupaten takalar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai Realisasi Anggaran Publik Berdasarkan Prinsip Islam Dalam Mencegah Praktik Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan anggaran publik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah disusun sesuai dengan sistem dan prosedur.
2. Adanya transparansi dan akuntabilitas memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan memperhatikan hak masyarakat untuk pemahaman yang komprehensif tentang tanggung jawab pengelolaan anggaran. Salah satu manfaat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah mencegah praktik korupsi.
3. Berdasarkan prinsip islam dengan menerapkan sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu: *shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah* dalam kepemimpinan untuk menegakkan moralitas, Jaga kepercayaan, bersikap teguh dalam pendirian, jujur dalam memikul tugas dan tanggung jawab yang dibebankan padanya, kuat iman dalam menolak godaan dan peluang untuk menyimpang. Maka tingkat kepercayaanya lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Badjuri, Jaeni, A. K. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jbe*, 28(1), 1–19. <https://www.unisbank.ac.id/ojs>;
- Ahmadani Azhari, Y. M. (2021). Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 93–107.
- Anggraeni, F., & Saleh, A. S. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Anggraeni, T. D. (2014). Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 417. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.34>
- Atnan, N. (2014). Fenomena korupsi pejabat publik di Jawa barat. *JKMP*, 2(2), 131–146.
- Badu, R. S. (2019). Konstruksi Sosial dan Lingkungan Melalui Metfora Amanah, Tabligh dan Fathonah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal (AKSARA)*, 05(01), 47–52.
- Budi S Purnomo, C. P. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, 6(3), 467–476. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- DARIMIS. (2015). REM-BEKAS (REVOLUSI MENTAL BERBASIS KONSELING SPRITUAL TEISTIK): Upaya Membangun Generasi Berkarakter FAST (Fathonah, Amanah, Siddiq, dan Tabligh). *Ta'dib*, 18(1), 47–56. <https://doi.org/10.31958/jt.v18i1.277>
- Endiana, I. G. A. S. P. D. M. P. E. A. (2019). komitmen organisasi sebagai pemoderasi pada pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan realisasi anggaran terhadap kinerja anggaran dan kinerja manajemen pada SKPD badan pekerjaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) kabupaten Bandung. *Seminar Nasional INOBALI*, 354–364.
- Febriyana, E. (2021). Analisis Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Target Analysis And Budget Realization Of Regional Expenditure and Revenue Of The Government Of Magelang District. *Jurnal Paradigma Multidisipliner*, 2(3), 220–227. <http://smkn1magelang.sch.id/jpm/index.php/jpm/article/view/1/1>
- Firmansyah, A.R, S., Frimaruwah, E., Periansya, Sari, R. I., Septiawati, A., & Islamiati, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang / Jasa. *Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 63–73.

- Himawan Pradipta, Achmad, S. R. (2022). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) BULUSARI KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 202. *Jurnal Al-Idārah*, 3(2), 80–91.
- Khairudin, R. E. (2016). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah (Studi pada pemerintah kota se-sumatera). *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 137–154. <http://www.bssaonline.org/content/95/6/2373%5Cnhttp://www.bssaonline.org/content/95/6/2373.short%0Ahttp://www.bssaonline.org/cgi/doi/10.1785/0120110286%0Ahttp://gji.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/gji/ggv142%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00024-01>
- Kusworo, D. L., Fauzi, M. N. K., & Dewi, C. R. (2021). Regional Surveillance Policy: Sinergitas Pengawasan terhadap Akuntabilitas Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27134>
- Muchriana muchran, Endang winarsih, H. (2021). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kabupaten luwu sulawesi selatan. *AJAR*, 04(02), 133–142.
- Muhammad Nurfaizy Hamdan, Fatahillah Ruslan, Riswanda Fatriansah Husain, Suhartono, R. A. (2020). Akuntabilitas penggunaan anggaran pada instansi pemerintah berdasarkan prinsip islam (Studi:satuan kerja perangkat daerah). *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 147–160.
- Nasuka, M. (2012). Etika Penjualan dalam Perspektif Islam. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.47-72>
- Nurhadiano, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *TECHNOBIZ : International Journal of Business*, 3(5), 25–30. <https://doi.org/10.33365/tb.v3i2.453>
- Putri Asih, Widaryanti, P. . (2021). Pengaruh Audit Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus pada Skpd Kota Semarang). *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 2(2), 161–174. <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1519>
- Rusrina, R. (2020). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi S1*, 1–9.
- Saridewi, A. A. A. N., Noak, P. A., & Supriyanti, N. W. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013). *Citizen Charter*, 1(2), 2861–2871.
- Syarief, R. A. O., & Prastiyo, D. (2018). Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 1–13. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/3947>
- Yuhertiana, I., Pranoto, S., & Priono, H. (2015). Perilaku disfungsi pada siklus penganggaran pemerintah: Tahap perencanaan anggaran. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 25–38. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art3>